

Transparansi Pembiayaan Program Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi

Tia Ayu Ningrum

¹Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang

*Penulis¹, e-mail: tiaayuningrum@fip.unp.ac.id

Abstract

One of the problems in funding at tertiary institutions is the transparency of student program funding. It has led to protests and questions from students about funding student programs in higher education. For this reason, the purpose of this article is to identify the transparency of student program funding as seen from student understanding. This article is expected to be able to explore the current conditions regarding the existing problems regarding funding for student programs. The methodology used is quantitative. The population in this study were students of Padang State University. The technique in determining the sample is random sampling, amounting to 250 people. From the results of the study about the transparency of student program funding is not good this can be known from students who still do not understand the financing of student programs in higher education. In detail, many students do not understand the budget for student programs and many students do not understand the source of funds for student programs.

Abstrak

Salah satu masalah pembiayaan pada perguruan tinggi adalah transparansi pembiayaan program kemahasiswaan sehingga menyebabkan adanya protes dan pertanyaan dari mahasiswa tentang pembiayaan program bidang kemahasiswaan pada pendidikan tinggi. Untuk itu tujuan dari artikel ini untuk mengidentifikasi tentang transparansi pembiayaan program kemahasiswaan yang dilihat dari pemahaman mahasiswa. Artikel ini diharapkan dapat mengupas kondisi saat ini tentang masalah yang ada tentang pembiayaan untuk program kemahasiswaan. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas negeri padang. Teknik dalam penentuan sampel yaitu random sampling yang berjumlah 250 orang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa transparansi pembiayaan program kemahasiswaan belum baik hal ini dapat diketahui dari mahasiswa yang masih kurang memahami pembiayaan program kemahasiswaan di perguruan tinggi. Secara rinci banyak mahasiswa kurang memahami anggaran untuk program kemahasiswaan dan banyak mahasiswa yang kurang memahami tentang sumber dana untuk program kemahasiswaan.

Kata Kunci: Transparansi, Pembiayaan, Program Kemahasiswaan, Perguruan Tinggi

How to Cite: Ningrum, Tia Ayu. Transparansi Pembiayaan Program Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, Vol 9(2): pp. 65-70, DOI: doi.org/10.24036/jbmp.v9i2



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author.

1. Pendahuluan

Pembiayaan merupakan salah satu standar pendidikan. Dimana setiap lembaga pendidikan harus mengelola pembiayaan dengan menggunakan prinsip akuntabilitas. Hal ini sangat penting untuk membangun kredibilitas lembaga pendidikan. Pembiayaan berperan penting dalam mutu pendidikan. Seperti yang dinyatakan oleh (Abidin, 2017)) bahwa salah satu elemen penting dalam mutu pendidikan adalah pembiayaan. (Blocher, Edward J, David E. Stout, 2014) juga menyatakan pembiayaan merupakan penggerak untuk tujuan yang telah dirancang.

Setiap lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi perlu melakukan manajemen keuangan dan pembiayaan karena secara normatif lembaga tersebut bukan lembaga profit. Sehingga lembaga pendidikan harus memberikan tanggung jawab bagi masyarakat termasuk peserta didik (Santoso, U., & Pambelum, 2008). (Wijaya, 2009) juga menyatakan jika lembaga pendidikan

harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana yang diperoleh oleh lembaga pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat.

Pembiayaan untuk pendidikan tinggi lebih kompleks dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini karena pendidikan tinggi memiliki sub sistim yang lebih banyak. Pendidikan tinggi memiliki bidang dan birokrasi yang lebih banyak. Dan salah satu bidang pembiayaan pada pendidikan tinggi adalah pembiayaan bidang kemahasiswaan. Pembiayaan bidang kemahasiswaan ini juga melibatkan mahasiswa dalam pengelolaannya. Hal ini karena program kemahasiswaan direncanakan, dilaksanakan dan evaluasi oleh mahasiswa yang dalam pelaksanaannya tetap diawasi oleh administrator program studi, fakultas dan universitas. Karena itu mahasiswa harus memahami jumlah dan sumber keuangan untuk program kemahasiswaan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh (Jones, 1985), salah satu hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. (Jones, 1985)

Kemudian dalam pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara transparan (Tangkudung, 2014). Mahasiswa harus memahami keuangan untuk program kemahasiswaan yang berasal dari anggaran perguruan tinggi. Hal ini karena dengan transparansi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan, dukungan dan partisipasi masyarakat, orang tua, pemerintah dan juga termasuk mahasiswa (Siswanto, 2013). Terkait transparansi dapat ditampilkan dalam bentuk data-data yang dapat diakses oleh mahasiswa dan masyarakat dan dilaporkan secara periodik (Handoyo, 2011; Ratnaningtyas, K., & Setiyani, 2017). Dan (Boy & Siringoringo, 2009) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat (wali murid).

Namun, hasil riset yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2003 menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Sekolah tidak pernah mengumumkan jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah, dan sekolah tidak pernah memberikan laporan pengelolaan dana kepada masyarakat secara transparan.

Kemudian juga terdapat masalah dalam transparansi pembiayaan program kemahasiswaan yang terjadi pada salah satu perguruan tinggi negeri. Fenomena-fenomena tersebut, yaitu: (1) adanya himpunan mahasiswa yang protes tentang pembiayaan untuk kegiatan dan program HMJ (himpunan mahasiswa jurusan), (2) adanya himpunan mahasiswa yang mengeluh karena perbedaan perlakuan masing-masing program studi dalam pemberian dana untuk kegiatan mahasiswa, (3) adanya himpunan mahasiswa protes tentang ketidakjelasan prosedur untuk mendapatkan dana dari anggaran kemahasiswaan, (4) adanya himpunan mahasiswa yang protes karena tidak diberi informasi dan dana untuk kegiatan kemahasiswaan, (5) Masih adanya isu dari mahasiswa bahwa adanya pungutan untuk kegiatan kemahasiswaan sedangkan kebijakan yang ada tidak membolehkan adanya pungutan (kebijakan BLU) kepada mahasiswa. Dari fenomena di atas dapat diketahui bahwa terdapat masalah tentang pemahaman siswa terhadap pembiayaan program kemahasiswaan. Untuk itulah penelitian tentang pemahaman tentang pembiayaan program kemahasiswaan di perguruan tinggi perlu dilakukan.

2. Metode Penelitian

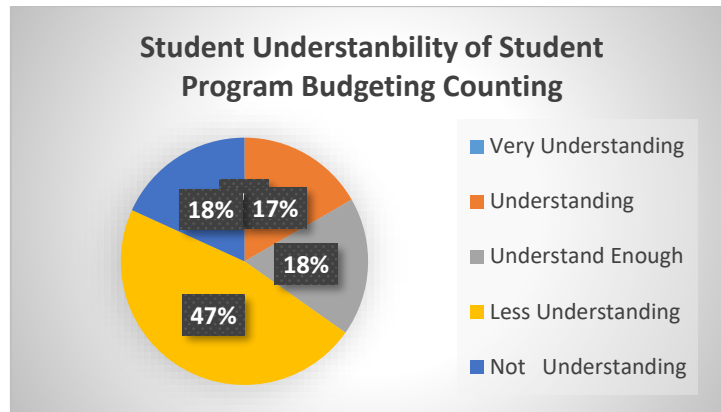
Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah kuantitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor, fakta, dan data-data yang diselidiki. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Sampel diambil dengan metode simple random sampling dengan jumlah 250 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan menggunakan skala likert dan telah diuji validitas dan reliabilitas. Data di analisis secara deskriptif dan diolah dengan menggunakan rumus persentase dan dianalisis menggunakan studi literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui tentang transparansi pembiayaan program kemahasiswaan di perguruan tinggi yang dilihat dari pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan program kemahasiswaan di pendidikan tinggi. Secara lebih rinci, tujuan penelitian tersebut melihat pemahaman mahasiswa terhadap anggaran untuk program kemahasiswaan dan pemahaman mahasiswa terhadap sumber dana untuk program kemahasiswaan.

1. Transparansi Pembiayaan Program Kemahasiswaan yang Dilihat dari Pemahaman Mahasiswa terhadap Anggaran untuk Program Kemahasiswaan

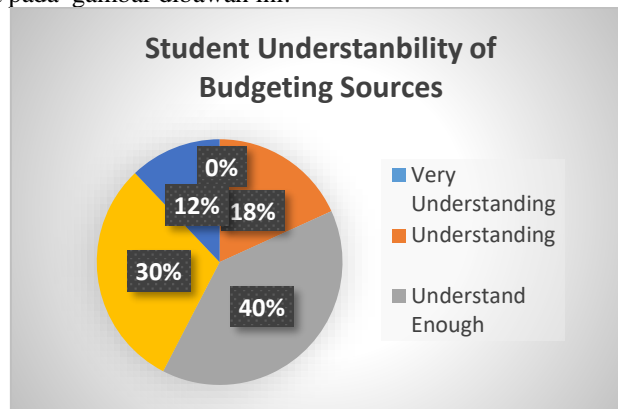
Salah satu hal yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah Transparansi Pembiayaan Program Kemahasiswaan yang Dilihat dari pemahaman mahasiswa terhadap anggaran untuk program kemahasiswaan. Hasil penelitian mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa tidak ada mahasiswa dari sampel penelitian yang sangat memahami anggaran untuk program kemahasiswaan dengan capaian 0%. Sebanyak 17% mahasiswa yang memahami anggaran untuk program kemahasiswaan, 18% mahasiswa cukup memahami mengenai anggaran untuk program kemahasiswaan, 47% mahasiswa kurang memahami mengenai anggaran untuk program kemahasiswaan dan 18% mahasiswa tidak memahami mengenai anggaran untuk program kemahasiswaan.

2. Tranparansi Pembiayaan Program Kemahasiswaan yang Dilihat dari Pemahaman Mahasiswa terhadap Sumber dana untuk Program kemahasiswaan

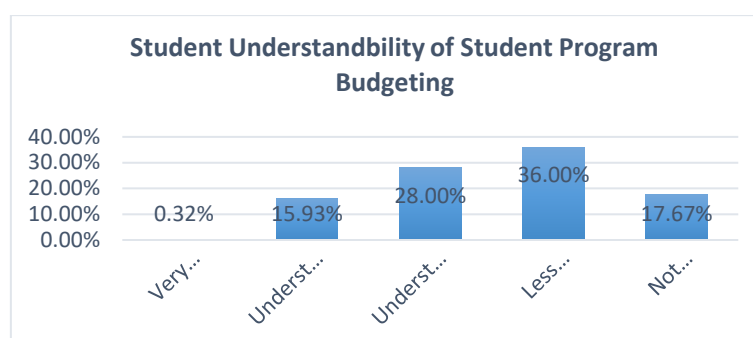
Fokus kedua dalam penelitian ini adalah melihat tranparansi pembiayaan program kemahasiswaan yang dilihat dari pemahaman mahasiswa terhadap sumber dana untuk program kemahasiswaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa tidak ada mahasiswa dari sampel penelitian yang sangat memahami sumber dana untuk program kemahasiswaan dengan capaian 0%. Sebanyak 18% mahasiswa yang memahami sumber dana untuk program kemahasiswaan, 40% mahasiswa cukup memahami sumber dana untuk program kemahasiswaan, 30% mahasiswa kurang memahami sumber dana untuk program kemahasiswaan dan 12% mahasiswa tidak memahami mengenai sumber dana untuk program kemahasiswaan.

3. Rekapitulasi

Rekapitulasi penelitian tentang tranparansi pembiayaan program kemahasiswaan yang dilihat dari pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan program kemahasiswaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pemahaman mahasiswa terhadap pembiayaan program kemahasiswaan yaitu 0,32 % mahasiswa sangat memahami tentang pembiayaan program kemahasiswaan, 15,93 % mahasiswa memahami pembiayaan program kemahasiswaan, 28,00 % mahasiswa cukup memahami pembiayaan program kemahasiswaan, 36,00 % mahasiswa kurang memahami pembiayaan program kemahasiswaan dan 17,67 % tidak memahami pembiayaan program kemahasiswaan.

Perguruan tinggi juga menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan dan lembaganya, hal ini terutang dalam Undang - undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 5. Untuk itu, pengelolaan pembiayaan pada perguruan tinggi dapat dilakukan lebih fleksibel dan mandiri. Hal ini sangat penting karena (Nurtety 2008) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan memiliki banyak memberikan manfaat bagi organisasi. Mulyono (2010) juga menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Pengalokasian biaya pendidikan ditentukan oleh penerimaan dan perolehan biaya yang besarnya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat, (Nanang., 2006)

Dari hasil rekapitulasi diketahui bahwa belum adanya transparansi pembiayaan program kemahasiswaan yang dilihat dari masih banyak mahasiswa yang kurang memahami mengenai hal tersebut. Transparansi sangat penting dalam pembiayaan. Menurut (Mardiasmo, 2006) Transparansi berarti keterbukaan (openses) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik (2006); akuntabilitas publik dalam masa pemerintahan neo liberal (Ramson, 2007). Transparansi di antaranya sudah diteliti oleh Stirton dan Lodge (2001).

Sesuai dengan prinsip transparansi, pembiayaan program mahasiswa harus transparan dan dipahami oleh mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan dan program mahasiswa. Mahasiswa harus memahami anggaran untuk kegiatan mahasiswa dan dari mana sumber keuangan untuk kegiatan/program mahasiswa. Hal itu karena, sumber pembiayaan pendidikan tidak hanya bersal dari satu sumber saja. Jadi untuk mendapatkan dana untuk kegiatan mahasiswa, mahasiswa perlu memahami sumber-sumber dana untuk kegiatan mahasiswa. Untuk sumber pembiayaan pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis: pertama, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa. Ketiga, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan. Dan keempat, dari lembaga pendidikan itu sendiri (Harsono, 2007). Memahami dan Menyediakan sumber daya keuangan untuk pendidikan tinggi mempengaruhi pencapaian banyak tujuan, dan juga misi ekonomi dan sosial yang dipercayakan oleh universitas (Victor Munteanu, 2011)

Selanjutnya (Krina, 2003) menyatakan transparansi pembiayaan meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang nantinya dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya dibuat berdasarkan atas preferensi masyarakat. Menurut Boy (2009) Secara ringkas prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti a) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, b) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, c) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Pengelolaan yang dianggap tidak transparan berdampak negatif bagi perkembangan sekolah, karena orang tua murid akan meragukan sumbangan yang mereka berikan akan benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan. Kemudian (Choiri, 2003) dalam penelitiannya, bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan tidak membawa perubahan yang signifikan, karena dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai macam penyimpangan penyimpangan, antara lain motivasi, kemampuan tenaga pelaksana/pengelola, sikap moral masyarakat serta lingkungan sosial yang tidak sehat. Transparansi penting, paling tidak karena tiga alasan yaitu pertama, untuk menjamin bahwa pemerintah akan merencanakan program secara tepat; kedua untuk menjamin pemerintah tidak akan menipu publik dan ketiga untuk mendukung kebijakan pemerintah (Infid, 2002). Hal tersebut di

atas menunjukkan bahwa sikap transparansi dalam pengelolaan keuangan dituntut agar publik lebih bisa percaya dan tidak menduga-duga yang keliru, hal demikian juga akan dapat meningkatkan partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Sementara itu faktor lain yang membuat masih berpartisipasinya public dalam pembiayaan pendidikan antara lain karena adanya aturan/ketentuan yang mengikat dan merasa mempunyai kewajiban.

4. Simpulan

Transparansi pembiayaan program dan kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi masih belum baik. Hal ini dilihat dari tingkat pemahaman mahasiswa terhadap program kemahasiswaan di perguruan tinggi masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari skor capaian sebanyak 0, 32 % mahasiswa sangat memahami, 15, 93 % mahasiswa memahami, 28,00 % mahasiswa cukup memahami, 36, 00 % mahasiswa, dan 17,67 % mahasiswa tidak memahami. Untuk lebih rincinya, banyak mahasiswa yang kurang memahami jumlah anggaran di pendidikan tinggi dalam bidang kemahasiswaan, banyak mahasiswa yang menyatakan tidak memahami sumber dana untuk pembiayaan sekolah, masih banyak mahasiswa yang menyatakan tidak memahami prosedur pembiayaan,

Daftar Rujukan

- Abidin, A. A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu. *Jurnal penjaminan mutu*, 3 No 1.
- Blocher, Edward J, David E. Stout, G. C. (2014). *Manajemen Biaya: Penekanan Strategis. Edisi 5 Buku 1*. Salemba Empat.
- Boy, D., & Siringoringo, H. (2009). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Apbs) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 12 Vol. 14.
- Choiri, N. H. (2003). Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Studi Kasus tentang Akuntabilitas Administratif Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. IV, N.
- Handoyo, F. . (2011). *Manajemen dan Keuangan Pendidikan. Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia*, .
- Harsono. (2007). *Pembiayaan pendidikan*. Surayajaya Pres.
- Jones, T. H. (1985). *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. Macmillan Publishing Company Jones.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*.
- Mardiasmo. (2006). *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*. Rosdakarya.
- Nanang., F. (2006). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Rosdakarya.
- Ratnaningtyas, K., & Setiyani, R. (2017). Efektivitas Komite Sekolah Sebagai Badan Pengawas Manajemen Keuangan Sekolah Pada SMA Negeri Se-Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 6 (2).
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Siswanto, E. (2013). *Good University Governance: Prinsip Dan Implementasi Dalam Penggalan Pendapatan*. Penerbit Gunung Samudera (Grup Penerbit Pt Book Mart Indonesia).
- Tangkudung, A. R. T. (2014). *Penerapan Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Bersih Dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo) gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Victor Munteanu, N. A.-C. (2011). Modern methods for underlying the revenue and expenses budget in higher

education institutions from romania based on the criteria of cost-efficiency. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 2445–2448. [https://pdf.sciencedirectassets.com/277811/1-s2.0-S1877042811X00071/1-s2.0-S1877042811006719/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjElr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQCo9r%2BbnBO1Hkn0hkVLdRxHTOJ2hm9olF5BHkFk11oJzgIhAIw62%2Fvo](https://pdf.sciencedirectassets.com/277811/1-s2.0-S1877042811X00071/1-s2.0-S1877042811006719/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjElr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQCo9r%2BbnBO1Hkn0hkVLdRxHTOJ2hm9olF5BHkFk11oJzgIhAIw62%2Fvo)

Wijaya, D. (2009). Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*.